

TAJUK RENCANA

Peta Kerawanan Pemilu

PEMILU 2024 tinggal menghitung hari. Suasana ehangati mulai terasa di kalangan media sosial serta di sejumlah pertemuan yang melibatkan banyak orang. Itulah sebabnya Bawaslu sejumlah daerah mulai memetakan kerawanan politik, menghadapi pesta demokrasi tersebut. Pemetaan tersebut di antaranya dilakukan Bawaslu Bantul (KR 2/10). Sejumlah tahapan mulai dipetakan, ditandai dengan identifikasi kerawanan. Peta rawan pemilu atau electoral risk map adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang dapat muncul selama proses pemilihan umum (pemilu) di suatu negara atau wilayah tertentu, seperti di Indonesia atau wilayah-wilayah khusus. Peta ini penting, sebab pemilu menjadi momen krusial dalam kehidupan politik suatu negara. Peta rawan pemilu dapat membantu menganalisis dan mengidentifikasi area-area yang memiliki potensi konflik atau kekerasan politik. Dengan mengetahui di mana risiko konflik tinggi, pihak berwenang dan pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegah atau meredakan konflik tersebut. Peta rawan pemilu, akan sangat membantu dalam perencanaan pengawasan pemilu. Organisasi pemantau pemilu, lembaga pemilihan, dan pemerintah dapat menggunakan informasi ini untuk menentukan di mana perlu ditempatkan pengamat pemilu, peralatan pemilihan, dan keamanan tambahan. Peta ini merupakan alat perencanaan yang berguna bagi lembaga-lembaga terkait dalam mempersiapkan pemilu. Ini dapat membantu dalam alokasi sumber daya yang efisien, termasuk personel keamanan, logistik pemilihan, dan pelatihan pemungutan suara. Peta rawan pemilu juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang risiko yang terkait pemilu. Dengan memberikan informasi kepada warga tentang area-area yang rawan, mereka dapat lebih waspada dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan. Setelah pemilu berlangsung, peta rawan pemilu dapat digunakan untuk

memantau perkembangan situasi pasca-pemilu. Ini membantu dalam mendeteksi, potensi konflik atau ketidakstabilan yang dapat muncul setelah pemilihan selesai. Dalam banyak kasus, peta rawan pemilu disusun organisasi internasional, LSM, atau pemerintah sebagai alat untuk mempromosikan pemilihan yang damai, bebas, dan adil. Peta ini membantu semua pihak terlibat dalam pemilu untuk lebih memahami dan mengatasi risiko yang mungkin timbul selama proses tersebut. Sehingga pemilu dapat berjalan dengan lebih aman dan transparan. Ketegangan politik antarpantai atau antarpengukung kandidat dapat menyebabkan konflik atau kerusuhan selama proses pemilihan. Faktor-faktor seperti retorika keras, ketidakpuasan politik, dan perbedaan ideologi dapat memperburuk situasi ini. Ancaman terhadap keamanan fisik pemilih, petugas pemilu, atau kandidat dapat menjadi faktor kerawanan. Ini termasuk ancaman teroris, tindak kekerasan, atau gangguan yang mengganggu proses pemilihan. Karena faktor semacam ini harus diabaikan. Masalah lain adalah yang berkaitan dengan akses pemilih ke tempat pemungutan suara, seperti perbedaan infrastruktur antara daerah perkotaan dan pedesaan, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi pemilih. Harus dibiasakan kepada masyarakat, untuk mengawasi tindakan-tindakan yang mencurigakan atau manipulasi pemilu, seperti kecurangan pemilu atau pelanggaran etika oleh calon atau partai politik, dapat menghasilkan ketidakpercayaan dalam proses pemilihan. Hal tersebut sangat mungkin melalui teknologi. Karena ancaman siber, termasuk serangan siber terhadap sistem pemilihan, pencurian data pemilih, atau penyebaran informasi palsu, dapat mengganggu integritas pemilu. Maka, tingkat pengawasan dan transparansi pemilu sangat penting untuk menghindari kerawanan. Lembaga pemantau pemilu, baik domestik maupun internasional, dapat membantu memastikan pemilu berlangsung secara adil dan bebas. (***)

Sinergi Cegah Bunuh Diri

PEMBERITAAN mengenai bunuh diri yang dilakukan kalangan pelajar dan mahasiswa di Yogyakarta, muncul kembali. Pertengahan September, seorang mahasiswa bunuh diri di kosnya. Awal Oktober ini, seorang mahasiswa diduga kuat mengakhiri hidupnya sendiri dengan melompat dari ketinggian. Data Polda DIY Januari hingga Juni 2023 merekam terjadinya 30 kasus bunuh diri di DIY. Dari pembicaraan penulis dengan seorang mitra kepolisian, angka percobaan bunuh diri di provinsi ini cukup tinggi. Narasumber yang tidak mau disebut namanya ini mengungkapkan, dari sepuluh kasus percobaan bunuh diri, hanya dua yang terekspos media massa dan media sosial. Artinya, jauh lebih banyak kasus (percobaan) bunuh diri yang tidak sempat kita ketahui.

Gejala Mencemaskan Di tingkat global, bunuh diri adalah penyebab kematian nomor dua di kalangan remaja berusia antara 10 dan 24 tahun secara global (Curtin dkk., 2016). Dan penelitian mengenai angka bunuh diri di kalangan remaja Indonesia menunjukkan gejala mencemaskan. Dari 8.643 responden berusia 13-18 tahun, sebanyak 4,75% pernah memikirkan bunuh diri dan 2,46% pernah mencoba bunuh diri dalam kurun waktu setahun terakhir (I Gusti Ngurah Edi Putra, dkk., 2019). Studi lain pada 2022 menunjukkan bahwa tingkat keseluruhan perilaku bunuh diri (gagasan bunuh diri dan upaya bunuh diri) remaja di Indonesia mencapai 8,7% dari responden. Faktor-faktor yang secara independen meningkatkan kemungkinan perilaku bunuh diri antara lain ialah bahwa pelaku mengalami perundungan, kecemasan, kesepian, adiksi alkohol, dan perilaku malas gerak (Marthoenis, dkk., 2022).

Saat ini faktor pemicu perilaku bunuh diri di kalangan pelajar dan mahasiswa semakin beragam dan intensif. Selain serba instan lantas terjerat hutang pinjaman online (pinjol). Sebuah penelitian menunjukkan keterkaitan antara perilaku bunuh diri dengan paparan konten terkait bunuh diri di media sosial. Sebanyak 25% anak muda terpapar cerita bunuh diri melalui media sosial (Dunlop dkk., 2011). Kaum muda yang depresi dengan mudah mendapatkan asupanendor bunuh diri lewat medsos. Sering terjadi, artis mancanegara idola mereka juga bunuh diri. Betapa beratnya beban psikologis kaum muda dan pelajar Indonesia zaman kiwari ini. Banyak kalangan menyebutkan, krisis bunuh diri terkait erat pula dengan krisis keluarga. Semakin banyak anak (muda) terpaksa menyak-

Bobby Steven

faktor-faktor eklasik seperti kesepian dan adiksi narkoba, muncul pula faktor-faktor baru yang terkait dengan ekesepian digital. Hanya karena medsosnya minim like dan tidak viral, remaja bisa depresi berat. Tambah lagi, kaum muda yang terlena dengan gaya hidup mewah



KR-JOKO SANTOSO

sikan perpisahan orang tua. Bukan hanya tanpa cinta nyata ibu, anak muda kita juga sering tanpa kasih nyata ayah. Hadirnya media sosial kerap justru menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

Dukungan Sosial Lantas, bagaimana langkah kita mencegah perilaku bunuh diri di kalangan kaum muda? Sinergi menjadi kunci. Faktor pemicu perilaku bunuh diri sangat beragam dan memerlukan perhatian lintasasektoral: keluarga, pendidik, rekan sebaya, agamawan, psikolog, dan lembaga negara.

Langkah utama untuk mencegah perilaku bunuh diri di lingkungan kita adalah menjadi insan yang peka pada sesama. Dukungan sosial memainkan peran penting dalam mencegah bunuh diri. Kita harus lebih suportif dan tidak menghakimi mereka yang mengalami depresi dan berperilaku bunuh diri.

Sekolah, asrama, dan komunitas keagamaan dan masyarakat perlu mempermudah akses mendapatkan pendampingan psikologi dan rohani guna mencegah bunuh diri. Kontrol media sosial perlu ditegaskan. Anggaran perlu dialokasikan untuk mencegah bunuh diri dengan edukasi dan kampanye medsos.

*)Dr Bobby Steven MSF, Biarawan dan Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma

Persyaratan Menulis Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Darurat Sampah Butuh Respons Politik

PENGELOLAAN sampah terlihat sebagai proses yang rutin: hulu-hilir, warga-pemerintah sehari-hari bekerja sama mengelola sampah. Sayangnya, walau terkesan sederhana atau gampang dikerjakan sampai saat ini masih sukar terwujud apalagi menjadi praktik jamak. Tentu ada beragam cara menjelaskan kondisi ini. Dalam kesempatan ini penulis fokus pada kapasitas negara. Yang sederhananya berarti kemampuan negara untuk mewujudkan agenda kebijakan sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan menghasilkan capaian yang diharapkan (Ruesmeyer & Skockpol, 1989).

Pengalaman darurat sampah yang terjadi di kota-kota di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, di mana sistem politik berbasis patronase dan klientelisme mendominasi. Uraian Patricia Strach dan Kathleen Sullivan dalam The Politics of Trash, How Governments Used Corruption to Clean Cities, 1890-1929 (Cornell University Press, 2023), memberikan wawasan berharga. Meskipun kedua penulis tersebut mengulas motif korupsi sebagai faktor penggerak dalam pengelolaan sampah, setidaknya ada dua pelajaran yang bisa dipetik. Pertama, pembuat kebijakan di eksekutif dan legislatif wajib melihat sampah dan pengelolaannya yang efektif sebagai ekomoditas politik melalui mana hasil-hasil politik dapat diperoleh. Rutenya tentu berbeda dengan konteks kepartaian di AS pada masa itu, yang dicirikan patronase dan klientelisme. Sistem ini memungkinkan pemimpin partai yang mendukung jabatan public menerima suap atau senjaja memberikan tender pada perusahaan yang berafiliasi ke partainya. Sebaliknya, hasil-hasil politik dapat dicapai dengan mendisain kebijakan pengelolaan sampah mengombinasikan beragam

Ashari Cahyo Edi

cara hingga memfasilitasi aparat dan warga agar terus belajar mengelola sampah (Schneider & Ingram, 1993). Eksekutif dapat meraih hasil politik yang mencakup popularitas dan peluang untuk terpilih kembali dalam pemilu 2024. Permasalahan sampah yang melibatkan sektor-sektor yang berbeda memungkinkan birokrasi untuk memperoleh alokasi APBD signifikan. Sementara bagi DPRD, keberpihakan politik pada masalah sampah juga dapat meningkatkan legitimasi alokasi dana Pokir para anggota dewan. Kedua, dalam desain kebijakan, perlu mempertimbangkan beragam sumber daya. Konteks kelembagaan, sosial-budaya, sejarah, teknologi, dan lainnya memungkinkan aneka sumber daya, formal dan informal, dicakup atau setidaknya dipertimbangkan dalam pembuatan disain kebijakan. Ini tentu berbeda dengan kasus di AS yang diulas Strach dan Sullivan (2023), di mana terdapat manipulasi hirarki gender yang melipatgandakan beban perempuan dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Sekadar ilustrasi dari konteks kelembagaan yang potensial sebagai sumber daya, status DIY adalah daerah istimewa yang ditopang kepastian kewenangan dan anggaran. Selain itu, setiap desa memiliki dana desa yang memungkinkan pemerintah supra-desa membina dan menginisiasi koordinasi-kolaborasi antara daerah dan desa. Daftar potensi sumber daya ini dapat

diperluas lagi, termasuk modal sosial yang sangat kuat di masyarakat.

Momentum Politik Sampah telah hadir begitu lama dalam seluruh aspek kehidupan kita sehingga seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tidak kasat mata, dan patut diabaikan (Strach & Sullivan, 2023). Kedaruratan sampah perlu ediwisudai dari status sekadar kondisi alamiah yang disebabkan oleh ketidakmampuan tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi masalah kebijakan yang mendesak dan memerlukan respons politik yang serius. Terlebih, saat ini, kita tengah menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD). Dan tahun depan adalah tahun politik: pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2024. Ini suatu kebetulan yang menjanjikan, sebuah momentum politik yang kondusif untuk memulai perubahan. *) Ashari Cahyo Edi, Dosen Ilmu Politik & Pemerintahan UGM, PhD Candidate di State University of New York at Albany.

PIKIRAN PEMBACA Naskah bisa dikirim Email atau WA pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000 dilampiri fotocopy/Scan KTP atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Perundungan Pelajar Makin Marak

SUNGGUH memprihatinkan bangsa kita. Bangsa yang dikenal ramah tamah dan mengedepankan perdamaian dirusak oleh peristiwa perundungan. Kasus ini dilakukan rata-rata oleh mereka yang masih berstatus pelajar, kepada teman-temannya yang dianggap tidak ehanginya. Peristiwa di Cilacap Jawa Tengah adalah bukti ada krisis moral di antara para perundung itu. Apa yang ada

dalam pikiran anak-anak kita? Dengan semena-mena menghajar, memukul dan menendang seolah-olah jagoan kepada temannya yang lemah, bahkan perempuan. Maka alangkah baiknya bila orangtua lebih ketat lagi mengawasi putranya agar tidak bergaul dengan orang jahat, atau mungkin lihat adegan sadis di HP-nya, Suhartono MSc, Catur Tunggal, Depok Sleman.

Yogya Indah Dimana-mana

MELEWATI Malioboro sekarang ini sungguh indah dan tampak bersih sekali. Apalagi pagi sebelum toko buka. Duduk di kursi, berfoto bisa dilakukan dengan santai. Dan pepohonan yang rata tinggi dan jaraknya, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Kalau malam hari, suasana terasa lebih indah. Karena lampu di kiri kanan jalan Malioboro kalau dipandang dari Utara seakan tampak men-

garah ke satu tempat, seperti mengerucut satu titik, padahal lampu itu berjajar. Yang pasti, pemandangannya jadi sangat indah sekali dinikmati mata. Tetapi pemandangan ini bukan hanya di Malioboro. Jl Sudirman kalau ditelusuri dari Timur, suasana indah. Juga yang lain. Sungguh Yogya indah dan keindahan ada dimana-mana. E Setiawan, Sonosewu Ngestiharjo Kasihan Bantul.

Pojok KR Whoosh diluncurkan, tandai modernisasi transportasi di Indonesia. --Harganya, mudah-mudahan terjangkau rakyat Pemohon uji materi usia minimal capres-cawapres, tarik gugatan. --Mudah-mudahan bukan karena politis. Aksi klithih mulai melanda daerah Jateng. --Sikat habis sebelum kemana-mana. Berabe

Kedaulatan Rakyat SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS. Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan. Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio : KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP. Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto. Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti. Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani. Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP